

JIT

JURNAL IPTEKS TERAPAN

Volume 6 No. 4 Desember 2012

ANALISA YURIDIS TERHADAP PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN BATAM (YLKB) DALAM UPAYA MENCEGAH KONSUMEN DARI MENGONSUMSI OBAT YANG PENGIKLANANNYA MENYESATKAN
Lebrata, Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman

PERSEPSI GURU DAN PENGELOLA SEKOLAH TERHADAP PENGELOLAAN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KAB. PADANG PARIAMAN
Erman Hair dan Asrul Thaher

KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Fitri Wahyuni

PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN GURU DALAM PENGELOLAAN KELAS
Yantoro

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP NASIONAL
Sukmareni

PERSYARATAN DAGANG (*TRADING TERM*) DALAM PERJANJIAN RITEL MODERN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
Ramli Simanjuntak, Rina Shahriyani Shahrullah, Yudhi Priyo Amboro

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI
H.Mhd. Ikhsan, Tommy Erwinsyah, dan Zul Aswin

SEMANTIK VERBA BERPELENGKAP DALAM KALIMAT BAHASA MINANGKABAU
Rustam

HISTORIS DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA
Mukhtar Dahri

RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN PERALATAN JARINGAN LAN MELALUI TELEPON SELULAR
Heri Mulyono

KONSISTENSI NETRALITAS POLITIK TNI DAN POLRI GUNAMENGAKTUALISASIKAN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
Titin Triana

TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) DI KABUPATEN KARIMUN
Sukari, Rina Shahriyani Shahrullah, Lu Sudirman

OPTIMALISASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN MERANGIN
Hafid Zakariya

HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI PADA IBU MENYUSUI TERHADAP KADAR ZINK DAN BESI AIR SUSU IBU SERTA PERTUMBUHAN LINIER ANAK
Yendrizal Jafri

OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE (*GUIDELINE FOR TREATMENT*)
Noverial



JIT

JURNAL IPTEKS TERAPAN

ISSN : 1979-9292

Jurnal Ipteks Terapan merupakan media publikasi ilmiah dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terapan. Semua tulisan dalam jurnal ini merupakan hasil terapan atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya Jurnal Ipteks Terapan ini dapat memperluas dan meningkatkan aktivitas akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Indonesia.

Chief Editorial : Damsar

Editorial Board : Hanafi (Kopertis Wilayah X)
Sumartono (Universitas Ekasakti)
Guranga Lal Dasvarma (Flinders University, Australia)
Nor Aisyah Buang (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Hafrizal Sandri (Universitas Bung Hatta)
Irwan Effendi (Universitas Muhammadiyah Riau)
Rina Shahriyani Shahrullah (Universitas Internasional Batam)
Syafirinaldi (Universitas Islam Riau)
Efa Yonnedi (Universitas Andalas)

Editorial Advisory : Wiko Saputra (Tanjung Biru Research Centre)
Irfan Sungkar (KasehDia Research Centre Malaysia)
Alfian Zein (Universitas Bung Hatta)
Jainabee MD Kasim (Universitas Kebangsaan Malaysia)
Yulmizar Hasan (Universitas Negeri Padang)
Sofyardi (Universitas Andalas)
Feliatra (Universitas Riau)
Zamzami (Universitas Jambi)
Hasan Basri Jumin (Universitas Islam Riau)
Mahdi (Universitas Andalas)
Sarjon Defit (Universitas Putra Indonesia-YPTK Padang)

Treasury : Febrina Fitri
Yandri. A.

Accounting : Yuniati
Murniati

Editorial Secretary : Yulmaizar
Laida Prefmi

Distribution/Circulation : Abu Nazar
A. Khermis
Fitri Astuti

Jurnal Ipteks Terapan terbit empat kali dalam setahun yaitu Maret, Juni, September dan Desember
Surat menyurat mengenai pengiriman artikel dan berlangganan dapat ditujukan pada :

Redaktur Jurnal Ipteks Terapan
Gedung Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman Padang-Sumatera Barat
Telp. +62 751 7056737 Fax +62 751 7056737
Email : rajoameh1999@yahoo.com

- ANALISA YURIDIS TERHADAP PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN BATAM (YLKB) DALAM UPAYA MENCEGAH KONSUMEN DARI MENGKONSUMSI OBAT YANG PENGIKLANANNYA MENYESATKAN**
Lebrata, Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman 1-26
- PERSEPSI GURU DAN PENGELOLA SEKOLAH TERHADAP PENGELOLAAN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KAB. PADANG PARIAMAN**
Erman Harr dan Asrul Thaher 27-42
- KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**
Fitri Wahyuni 43-56
- PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN GURU DALAM PENGELOLAAN KELAS**
Yantoro 57-71
- EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP NASIONAL**
Sukmareni 72-96
- PERSYARATAN DAGANG (TRADING TERM) DALAM PERJANJIAN RITEL MODERN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA**
Ramli Simanjuntak, Rina Shahriyani Shahrullah, Yudhi Priyo Amboro 97-125
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI**
H.Mhd. Ikhsan, Tommy Erwinsyah, dan Zul Aswin 126-133
- SEMANTIK VERBA BERPELENGKAP DALAM KALIMAT BAHASA MINANGKABAU**
Rustam 134-146
- HISTORIS DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA**
Mukhtar Dahri 147-155

**RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN PERALATAN JARINGAN
LAN MELALUI TELEPON SELULAR**

Heri Mulyono

156-173

**KONSISTENSI NETRALITAS POLITIK TNI DAN POLRI GUNA
MENGAKTUALISASIKAN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Titin Triana

174-191

**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU (BPPT) DI KABUPATEN KARIMUN**

Sukari, Rina Shahriyani Shahrullah, Lu Sudirman

192-217

**OPTIMALISASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN MERANGIN**

Hafid Zakariya

218-236

**HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI PADA IBU MENYUSUI TERHADAP KADAR
ZINK DAN BESI AIR SUSU IBU SERTA PERTUMBUHAN LINIER ANAK**

Yendrizal Jafri

237-254

OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE (GUIDELINE FOR TREATMENT)

Noverial

255-274

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP NASIONAL

Sukmareni

**Sukmareni adalah Staf Pengajar STIH YPKMI Padang
Dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana**

ABSTRAK

Pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda yang masih berlaku sampai sekarang walaupun sudah dilakukan beberapa kali perubahan sudah tidak bisa ditunda lagi, karena sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa sebagai nilai-nilai serta kepribadian yang dijunjung tinggi bangsa yang tercermin dalam hukum pidana adat, (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang secara materiil dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan tersebut terutama mengenai masalah-masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta tentang pidana dan pembedaan. Kontribusi dan eksistensi hukum adat dalam pembaharuan KUHP nampak dari prinsip-prinsip yang secara substansial termuat dalam konsep rancangan KUHP sebagai *ius constituendum*. Nilai-nilai hukum pidana adat yang ada, di generalisasikan dan diambil untuk diberlakukan secara nasional. Dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang mengedepankan azas keadilan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum pidana adat yang selama ini diakui keberadaannya telah diserap dalam konsep rancangan KUHP.

Kata kunci : *eksistensi, hukum pidana adat, RUU-KUHP*

A. PENDAHULUAN

Sebagai akibat politik hukum yang dijalankan Hindia Belanda di masa penjajahan yang bersifat *dualisme* sistem bahkan *pluralistik* telah mewarisi keadaan hukum yang kenyataannya pluralistik pula. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) untuk seluruh Indonesia, maka tidak ada lagi dualisme hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang ini menjadikan uniformitas terhadap keadaan pluralisme hukum pidana yang ada di wilayah Indonesia sebelumnya. Namun berlakunya UU No.1/1946 digambarkan sebagai suatu peraturan pendahuluan yang harus disesuaikan sebelum ditetapkan KUHP yang baru dan Nasional.¹ Oleh

¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekarang dan Masa Yang Akan datang*, edisi ketiga, Pantjuran Tujuh, 1971. Hlm.6.